
**TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN MASYARAKAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI DAMPAK DARI
PENERAPAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH****Sunaryo N. Tuah**Universitas Palangka Raya

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Riwayat Artikel:*Received* : April 20th, 2022*Revised* : May 5th, 2022May 25th, 2022*Accepted* : June 15th, 2022**Keywords:***Regional independence, economic growth and poverty levels*

This study aims to see the impact of implementing regional financial independence on economic growth and the poverty level of the people of West Kotawaringin Regency. This research is quantitative descriptive. The data used is secondary data for the 2009-2018 time series. Collecting data using library research method. The results showed that the level of regional financial independence had a significant and positive direct effect on economic growth and had a negative effect on the poverty level of the people of West Kotawaringin Regency. Indirectly, the level of regional financial independence has a negative influence on the poverty level of the people of West Kotawaringin Regency.

ABSTRAK

Kata Kunci:*Kemandirian daerah, Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Kemiskinan.*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak penerapan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder time series tahun 2009-2018. Pengumpulan data menggunakan metode library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara tidak langsung tingkat kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata didaerah tersebut. Keberhasilan pembangunan ekonomi sering diukur berdasarkan laju pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good govermance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiscal suatudaerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak.

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan Daerah Kabupaten yang otonom. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lima (5) tahun terkahir setiap tahun mengalami peningkatan antara 2,92% hingga 26,06%. Laju pertumbuhan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung meningkat walapun pada tahun 2016 menurun jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Disisi lain tingkat kemiskinan masyarakat setiap tahun cenderung semakin menurun.

Adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan kemandirian keuangan daerah ini setiap tahun akan mengalami peningkatan dan selanjutnya akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Penelitian tentang pengaruh kemandirian keuang daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Belum pernah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana lebih menggunakan data berupa angka-angka dalam menganalisis fakta – fakta yang ditemukan untuk membuktikan hipotesis. Kabupaten ini adalah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang otonomi daerah. Kabupaten ini merupakan kabupaten induk setelah mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten. Jenis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Dilihat dari sumbernya, data yang digunakan adalah merupakan data sekunder berderet waktu (*time series*) periode tahun 2009-2018. Data-data utama yang diperlukan adalah ; a) Data Keuangan Daerah (APBD), b) Data Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), c)

Persentase dan Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun selama periode tahun penelitian ini.

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diukur dengan pendekatan Angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). RKKD menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana lokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK), Dana darurat dan pinjaman. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung RKKD adalah sebagai berikut (Abdul Halim 2007) :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Transfer Pemerintah Pusat + Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah semakin tinggi mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Kemampuan keuangan atau tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) klasifikasi, sebagai mana dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0% - 10,00%
Rendah	10,01% - 20,00%
Sedang	20,01% - 30,00%
Cukup	30,01% - 40,00%
Baik	40,01 - 50,00%
Sangat Baik	> 50%

Sumber : Tim Litbang Daepdagri-Fisipol UGM (Dalam Cheris, dkk 2016).

Menganalisis Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dianalisis secara kuantitatif dengan metode statistik. Model analisis yang digunakan adalah model persamaan analisis jalur (Path Analysis).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data Pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2009 hingga 2018 dapat dilihat pada table 2 di bawah ini.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	RKKD (%)	Kriteria/Pola Hubungan
-------	----------	-----------------------	----------	------------------------

2009	35.429.548.643,88	519.230.639.252,00	6,82	Sangat Kurang/ Instruktif
2010	42.815.214.150,86	510.741.217.815,00	8,38	Sangat Kurang/ Instruktif
2011	48.202.012.905,35	517.762.011.239,00	9,30	Sangat Kurang/ Instruktif
2012	66.466.128.910,13	688.515.498.273,47	9,47	Sangat Kurang/ Instruktif
2013	88.843.661.000,00	358.189.648.550,00	23,89	Sedang/ Instruktif
2014	121.396.033.600,00	654.073.011.570,00	18,56	Kurang/ Instruktif
2015	123.315.123.948,31	710.868.985.668,00	15,61	Kurang/ Instruktif
2016	169.553.931.069,12	999.504.184.473,00	17,97	Kurang/ Instruktif
2017	176.855.124.641,39	938.379.876.488,00	18,84	Kurang/ Instruktif
2018	179.785.920.666,73	913.940.904.918,00	19,67	Kurang/ Instruktif
Rata-rata			15,35	Kurang/ Instruktif

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, Juni 2020

Rasio kemandirian dapat memberi gambaran tingkat suatu daerah terhadap sumber dana ekstern. Tingginya angka rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern juga tinggi (terutama pemerintah pusat dan provinsi) begitu juga sebaliknya.

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009-2018 menunjukkan adanya fluktuasi seperti ditunjukkan pada table di atas. Tahun 2009 hasil rasio menunjukkan nilai 6,82 dan masuk dalam kategori sangat kurang/ instruktif. Pada tahun 2010 hasil rasionya mengalami kenaikan menjadi 8,38 termasuk kategori sangat kurang/Instruktif. Pada tahun 2011-2012 hasil rasio menunjukkan dalam kategori sangat kurang/Instruktif dengan skala intervalnya di persentase 0,00-10,00%. Pada tahun 2013 hasil rasionya mengalami kenaikan menjadi 23,89 termasuk kategori sedang/ Instruktif. Pada tahun 2014-2015 hasil rasio mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori kurang/Instruktif. Pada tahun 2016-2018 hasil rasio kembali mengalami kenaikan dan termasuk dalam kategori kurang/ Instruktif. Secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009-2018 yaitu sebesar 15,35% termasuk kategori kurang/Instruktif. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat. Angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) periode tahun 2009 hingga 2018 mengalami peningkatan dari 6,82 % menjadi 23,89 %, sementara pada periode yang sama laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari 6,41% menjadi 7,55%, dan tingkat kemiskinan masyarakat menurun dari 6,87% menjadi 5,44%. Pada periode ini ada kecenderungan perubahan angka RKKD dengan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan perubahan yang searah, sementara perubahan RKKD dengan tingkat kemiskinan cenderung menunjukkan hubungan yang berlawanan arah.

Angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah periode selanjutnya 2013-2015 mengalami penurunan dari 23,89% menjadi 15,61%, sementara disisi lain laju pertumbuhan

ekonomi sedikit mengalami penurunan dari 7,55% menjadi 7,32% dan tingkat kemiskinan masyarakat menurun dari 5,44% menjadi 4,52%. Selama periode ini perubahan RKKD, perubahan laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan sama-sama mengalami penurunan atau terdapat pola perubahan yang searah.

Selanjutnya angka RKKD pada periode tahun 2015-2019 cenderung meningkat dari 5,61%, menjadi 8,93%, sementara disisi lain laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 7,32% menjadi 6,47% dan tingkat kemiskinan masyarakat juga menurun dari 5,50% menjadi 4,27%. Pada periode ini perubahan angka RKKD dengan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat terdapat perubahan yang tidak searah. Selama periode tahun 2009-2019 bagaimanakah pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah (RKKD) baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Koefisien regresi yang ditemukan sebesar 0,018 dengan tingkat signifikansi 0,528. Karena $0,528 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh langsung yang signifikan dari Kemandirian Keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kesimpulan pengujian secara parsial ini juga didukung dengan nilai R^2 yang sangat rendah ($R^2 = 0,050$) dan nilai $F = 0,477$.

Variasi laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan oleh Kemandirian Keuangan Daerah secara langsung hanya sebesar 5,0% ($R^2 = 0,050$), sisanya sebesar 95% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ikut dianalisis dalam penelitian ini seperti investasi baik pemerintah dan swasta, munculnya kesempatan kerja, dan penggunaan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari nilai konstanta 6,46 dan signifikan hingga 100%. Artinya faktor-faktor lain yang dianggap konstan selama periode waktu penelitian ini, mempunyai pengaruh yang signifikan hingga 100%.

Koefisien regresi yang ditemukan sebesar -3,66 dengan tingkat signifikansi 0,50. Karena $0,0050 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh langsung yang signifikan dari Kemandirian Keuangan Daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setiap terjadi peningkatan angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1% secara langsung akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,7% (*Ceteris paribus*).

Kesimpulan pengujian secara parsial ini juga didukung dengan nilai $R^2 = 0,598$ dan nilai $F = 13,396$. Faktor kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama dengan faktor-faktor lain yang dianggap konstan mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Besarnya perubahan tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh perubahan angka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar 59,80% ($R^2 = 0,598$) sisanya sebesar 40,20% dipengaruhi oleh perubahan-perubahan faktor lain yang tidak ikut dianalisis.

Nilai konstanta diperoleh sebesar 7,407 dan signifikan hingga tingkat keyakinan 100%. Artinya faktor-faktor lain yang dianggap konstan selama periode waktu penelitian ini, mempunyai pengaruh yang signifikan hingga 100%. Hasil analisis persamaan struktur diperoleh seperti pada Tabel di bawah ini. Hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Konstanta (α_0) = 4,54, nilai t hitung = 1,60 dan tingkat signifikansinya = 0,15. Ini berarti bahwa nilai konstanta yang ditemukan sebesar 4,54 berbeda nyata dengan nol hingga tingkat keyakinan 85,00%. Faktor-faktor yang dianggap konstan selama periode waktu

penelitian ini, mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan hingga tingkat keyakinan 85,00% sebesar 4,54 %. Koefisien regresi $P2 = -0,13$, nilai t hitung = $-3,81$ dan tingkat signifikansinya = $0,005$. Ini berarti bahwa koefisien regresi $P2 = -0,13$ berbeda nyata dengan nol. Hingga tingkat keyakinan 99,5%, bahwa kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Koefisien regresi $P3 = -0,44$, nilai t hitung = $-1,03$ dan tingkat signifikansinya = $0,07$. Ini berarti bahwa koefisien regresi $P3 = -0,44$ berbeda nyata dengan nol. Hingga tingkat keyakinan 92,9 %, bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada nilai yang rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama tahun 2009-2018 adalah sebesar 15,4 %. Tingkat kemandirian keuangan daerah secara langsung mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 0,7%. Tingkat kemandirian keuangan daerah secara langsung mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar -3,660%. Tingkat kemandirian keuangan daerah secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar -0,00801 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi IV, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. ASP-05
- Agustina, Oesi. 2013. Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011) Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Agus Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012
- Ahmad Yani. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers
- Andri Haryanto. 2014. Analisis Efektivitas Kemandirian dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Medan
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE.Yogyakarta
- Dwiranda. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Universitas Udayana
- Ika Etika Nur Handayani. 2012. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ir. Sutami. 2013. Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam Untuk Tahun 2006-2010. Batam

- Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nataluddin. 2001. Potensi Dana Perimbangan Daerah Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-YKPN
- Octovido Irsandy. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu Tahun (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah kota Batu tahun 2009-2013). Jurnal Berkala Administrasi Bisnis, Volume 15 No.1
- Ramadhani, Febby Randria. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2016
- Riris Dewi Anggriani. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanggerang Tahun Anggaran 2010-2014. Tanggerang
- Saputra, Dori. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal. Universitas Negeri Padang
- Tarnoto. 2018. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus: Provinsi Banten tahun 2011-2015. Banten
- Todaro, Michae, P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ketujuh diterjemahkan oleh Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Wandira Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal AAJ 2 (1) (2013)